

PERUBAHAN PARADIGMA UNTUK ATASI KEMISKINAN

Oleh: Purbayu Budi Santosa

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Mass poverty is an acute problem experienced by Indonesia. On the other hand, Indonesia itself is well-known for its richness of the natural resources. The shifting of paradigm is necessary to solve the mass poverty problem, from the casual way to act and to think to the extraordinary one. In economics science the casual way to act and to think is reflected in the conventional economic science (orthodox), in which poverty is taken care by providing capital and technical aid. Meanwhile, extraordinary thinking and acting is based on the heterodox economics science in which the analysis of economics is not only based on the factors of economics but also by considering non economic factors. Therefore, capital and technical aid will reach the target whenever the non economic factors become the main consideration on solving poverty problem.

Keywords: Paradigm, Poverty, Orthodox Economic Science And Heterodox Economic Science

I. PENDAHULUAN

Bank Dunia melaporkan pada tahun 2006 jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan sekitar 49 persen dari total penduduk. Dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia 200 juta, maka hampir 109 juta orang Indonesia terperangkap dalam tingkat kemiskinan. Lembaga internasional tersebut menghitung tingkat kemiskinan dengan standar daya beli masyarakat kurang dari \$ 2 per hari secara universal untuk semua negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2006 menyebutkan jumlah penduduk miskin sebanyak 39,05 juta atau hanya 17,75 persen dari total penduduk Indonesia. Perhitungan kriteria kemiskinan menurut BPS berdasarkan kebutuhan kalori minimal 2.100 kkal atau sekitar Rp 152.847 per kapita per bulan pada bulan Maret 2006. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia kemiskinan di Indonesia adalah hampir tiga kali lipat dari kriteria resmi pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengakui meningkatnya jumlah orang miskin selama setahun, di mana pada bulan Februari 2005 jumlah orang miskin sebanyak 35,10 juta penduduk atau 15,97 persen. Jadi persentase kenaikan orang miskin di Indonesia sekitar 1,78 persen.

Laporan Tahunan Pembangunan Manusia dari PBB tahun 2006 menunjukkan pembangunan manusia (*human development*) pada peringkat ke - 110, menjadi terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja. Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia menurut laporan regional pencapaian *Millenium Development Goal* Asia Pasifik yang diluncurkan 16 Oktober 2006 oleh ADB-UNDP-UNESCAP menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan. Dalam laporan yang berjudul “*The Millenium Development Goal, Progress Report in Asia and the Pasific 2006*”, Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Banglades, Laos, Myanmar, Pakistan, Papua Niugini, dan Filipina .

Laporan PBB tersebut menunjukkan masih banyak rakyat Indonesia yang terjauhkan aksesnya terhadap air. Begitu juga, data Susenas tahun 2002, dari 29 provinsi di Indonesia, hanya ada sembilan provinsi yang ada di atas angka-angka rata-rata Indonesia untuk akses air bersih. Artinya, bahwa diantara berbagai provinsi dan di dalam provinsi tersebut terdapat kesenjangan dalam akses untuk air bersih ((Wahyu Susilo, 2007).

Kemiskinan berdasarkan angka statistik tersebut di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Keadaan ini tentunya sangat kontras dengan keadaan sumberdaya alam yang sangat kaya yang dimiliki Indonesia. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang dapat untung dengan kekayaan sumberdaya alam tersebut ? Mengapa mayoritas rakyat Indonesia tidak menerima keberkahan sumberdaya alam yang sangat berlimpah tersebut? Apa ada yang salah dilakukan dalam memikirkan Indonesia yang kemudian terjadi kesalahan dalam wujud kebijakan yang diambil?

Penulis dalam hal ini akan mengemukakan perlunya perubahan paradigma untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut diharapkan pemecahan terhadap kemiskinan menjadi lebih baik dan kemiskinan dapat dikurangi sangat bermakna di negara ini.

II. PERUBAHAN PARADIGMA

Perspektif dalam bidang keilmuan sering disebut paradigma (*paradigm*), yang kadang-kadang disebut pula madzab pemikiran (*school of thought*) atau teori. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Sebagaimana dikatan Patton (1990 dalam Deddy

Mulyana, 2004) paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau estistensial yang panjang. Akan tetapi menurut Patton, aspek paradigma inilah yang sekaligus merupakan kekuatan dan kelemahannya, di mana kekuatannya adalah hal itu memungkinkan tindakan, kelemahannya adalah bahwa alasan untuk melakukan tindakan tersebut tersembunyi dalam asumsi-asumsi paradigma yang tidak dipersoalkan.

Perubahan paradigma yang dimaksud di sini dengan mengadopsi kepada pemikirannya Satjipto Rahardjo (2007). Menurutnya, bertindak dan berpikir biasa adalah tindakan yang sesuai dan berdasarkan konvensi-konvensi yang sudah disepakati. Di sisi lain, apabila kita memutuskan untuk menempuh jalur yang luar biasa, maka yang akan kita lakukan adalah cara yang berseberangan dengan yang disebut biasa tersebut. Dalam psikologi cara berpikir yang biasa adalah analog dengan berpikir menggunakan IQ (*intellectual quotient*) yang bersifat linier, mekanistik, masinal, rasional, logis, dan ketat berdasarkan aturan (*rule-bound*). Adapun berpikir yang luar biasa dianalogkan dengan tren penggunaan SQ (*spiritual quotient*). SQ mengandalkan cara-cara yang melompat, kreatif, mematahkan aturan lama (*rule-breaking*) dengan membuat aturan baru (*rule-making*).

Fisikawan German Max Planck menyatakan kemajuan akademik ilmu akan menjadi kuburan selama kegiatan akademik juga mengalami kemandegan (Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2003). Searah dengan ini, Alvin Toffler (1985) menyatakan ilmu tradisonal cenderung lebih memberikan tekanan pada stabilitas, ketertiban, uniformitas dan keseimbangan (*equilibrium*), sedangkan ilmu sekarang menekankan pada perubahan sosial yang bersifat akseleratif dengan ciri-ciri: ketidak-tertiban (*disorder*), ketidak-stabilan, keaneka-ragaman (*diversity*), ketidak-seimbangan (*disequilibrium*), serta hubungan-hubungan yang tidak lurus (*nonlinear*). Menurut Satjipto Rahardjo, ketertiban dan ketidak-tertiban (kekacauan) dengan berkaca kepada disiplin ilmu fisika dan kimia, ditempatkan bukan pada posisi eksklusif melainkan lebih inklusif dan berada pada aras kontinum (bersambungan).

Selanjutnya Horgan (2005) menyatakan ilmu pengetahuan telah memasuki babak senja kala (kematian). Yasraf A. Piliang (2005) menyatakan paling tidak terdapat tiga makna kematian ilmu pengetahuan. Pertama, kematian sebagai suatu yang melampaui batas untuk menuju titik ekstrim, peleburan dan pencampuradukan (*trans*), dan kondisi tidak ada lagi obyek (ilmu pengetahuan) itu sendiri.

Lebih lanjut, Horgan menyatakan ilmu pengetahuan sebagai wahana menemukan berbagai 'kebaharuan' (*newness*) dan pengalaman baru di masa

depan, berakhir disebabkan ia bekerja terlalu sempurna, sehingga ia melampaui segala tanpa batas, yang di dalamnya tidak ada lagi kebaruan yang dapat diharapkan, tidak ada lagi jajahan baru (*frontier*) yang dapat dieksplorasi, tidak ada lagi obyek ilmu pengetahuan yang dapat diteliti dan tidak ada lagi utopia masa depan yang bisa diraih.

Meski demikian, ilmu pengetahuan tentunya tidak benar-benar ‘mati’ dalam pengertian sebenarnya, akan tetapi ia kini hidup dengan ‘cara ironis’ (*ironic science*), atau dengan cara ‘fatalistik’ (*fatalistic science*). Disebabkan ilmu pengetahuan telah kehilangan kekuatan kemajuan dan linearitasnya, kekuatan inovasi dan penemuan barunya, maka apa yang dapat dilakukan dalam ilmu pengetahuan adalah mencampur-adukkan segala hal yang ada, dalam sebuah kondisi turbulensi dan chaotic. Terjadi persilangan, pencampuran dan perkawinan kompleks antara ilmu pengetahuan dan bidang-bidang lainnya, seperti sastra, seni, atau agama.

Apa yang dikatakan Horgan ternyata selaras dengan Capra (2000) yang menyatakan kerusakan di dunia ini disebabkan oleh pandangan dunia mekanistik ilmu pengetahuan berdasarkan Cartesian dan Newtonian dan untuk merubahnya ke masa depan yang lebih baik berdasarkan paradigma yang holistik tentang ilmu pengetahuan dan spiritualisme. Menurut Capra (2001) terdapat tradisi-tradisi mistik yang terdapat dalam setiap agama dan halqah-halqah mistikal itu bisa juga ditemukan pada banyak ajaran filsafat Barat. Paralel-paralel fisika modern tidak hanya muncul pada dalam *Veda* Hinduisme, dalam *I Ching*, atau dalam *sutra-sutra* Budha, tetapi juga dalam fragmen-fragmen Heraclitus, dalam sufisme Ibnu Arabi, atau dalam ajaran-ajaran Don Juan, Sang Penyair.

Berdasarkan argumentasi tersebut ekarang ini perlu berpikir yang luar biasa, maka dalam ilmu ekonomi yang masih menggunakan berpikir yang biasa dengan paradigma positivisme dengan menggunakan alat analisis kuantitatif perlu ditinjau kembali. Hal ini disebabkan ilmu ekonomi yang menggunakan modeling dengan variabel yang terbatas, disertai asumsi yang ketat, untuk menganalisis keadaan ekonomi dalam dunia nyata sering tidak cocok. Masalah kemiskinan massa, ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang semakin parah dan masalah kerusakan lingkungan; merupakan masalah yang disebabkan oleh penerapan ilmu ekonomi yang positivisme dan bebas nilai.

Adapun berpikir yang luar biasa yang dimaksudkan di sini adalah perlunya mempertimbangkan masalah ekonomi dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Menurut Myrdal dalam karya monumental Myrdal *Asian Drama* (1972) yang mengantarkannya memperoleh hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1974, menerangkan kegagalan pembangunan di Asia karena terlalu mengadopsi model ekonomi Neo-Klasik dan kurang memperhatikan faktor-

faktor non ekonomi, seperti keadaan politik, sosial, budaya dan hukum. Selanjutnya menurutnya, faktor-faktor non ekonomi yang berpengaruh dalam analisis ekonomi disebutnya sebagai *value premises*.

Bahkan Levitt dan Dubner (2006) dengan bukunya *Freakonomics* berusaha membongkar sisi tersembunyi dalam berbagai hal dengan menggunakan metode yang tidak umum dipakai dalam ilmu ekonomi. Dia mempelajari ilmu ekonomi dengan cara non-ortodoks. Tampaknya dia melihat sesuatu tidak terlalu banyak dari aspek akademiknya, namun ia menempatkan dirinya sebagai seorang eksplorasi yang cerdas dan penuh penasaran, yang terkadang menggunakan metode intuisi.

III. PENYEBAB KEMISKINAN

Masalah kemiskinan massa merupakan salah satu masalah yang berat, yang dihadapi oleh umat manusia di dunia ini. Masalah kemiskinan massa tidak hanya dihadapi oleh berbagai negara secara masif, akan tetapi banyak dari negara maju masih juga mengalami kemiskinan yang cukup berarti. Mengapa kemiskinan masih menghinggapi banyak orang di tengah kemajuan yang lebih baik dari sebelumnya ?

Seabrook (2006) berpendapat kemiskinan massa (global) disebabkan kegagalan model ekonomi neoliberalisme. Ul Haq (1983) berpendapat tirai kemiskinan yang terjadi di dunia karena palutan sistem dunia. Menurutnya bangunan kapitalisme hanya mungkin berdiri di atas kesengsaraan orang miskin. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi andalan bagi ekonomi kapitalisme hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara kemiskinan massa masih tetap menyelimuti.

Ragnar Nurske menyebutkan kemiskinan yang dialami oleh banyak orang dikarenakan adanya lingkaran kemiskinan. Supaya rantai lingkaran kemiskinan dapat terputus, maka menurut ekonom ortodoks perlu dilakukan pembangunan ekonomi, yang bertumpu kepada bantuan modal dan teknik. Logika berpikir negara maju tersebut ternyata banyak sekali kemencengannya bagi negara sedang berkembang, di mana kemiskinan massa tetap terjadi (Galbraith, 1979). Galbraith mirip dengan Myrdal menyebutkan ketidakcocokan model pembangunan negara maju di negara sedang berkembang karena tidak memperhatikan faktor-faktor non ekonomi yang berpengaruh begitu penting bagi pembangunan ekonomi.

Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, akan tetapi mengalami paradoks dengan kemiskinan massa yang sampai kini masih merupakan problem yang sangat berat. Adopsi pembangunan Indonesia yang bertumpu kepada negara maju memang pada

satu sisi menyebabkan adanya kemajuan, akan tetapi seperti dinyatakan dalam angka statistik kemiskinan merupakan problem yang tidak pernah selesai dan rupanya tambah berat.

Cliford Geertz sebagai ahli antropologi terkemuka dan baru saja meninggal, menyatakan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh karena penjajahan Belanda dengan Tanam Pakjanya. Menurutnya, negara Indonesia dahulu diperangkap perkebunannya, sehingga kemiskinan massa terjadi, sedangkan hanya sekelompok kecil saja orang yang kaya.

Tanaman tebu, kopi, teh, dan lain-lain produk dari negara Indonesia sangat tersohor di luar negeri. Akan tetapi nasib rakyat kebanyakan tetap termarjinkan berada dalam keadaan papa. Mengingat budaya gotong royong masih demikian kental, maka menurut Scott berkembanglah etos subsistensi, yang untuk Geertz muncul dengan bagi-bagi kemiskinan.

John Perkins (2005) sebagai salah seorang konsultan Bank Dunia mengingatkan bagaimana negara yang kaya sumberdaya alam, seperti Indonesia yang dalam tataran dunia menempati peringkat atas, akan selalu dicoba diobok-obok pihak asing untuk tetap dikuasai. Berbagai cara dari yang paling halus sampai yang paling kasar selalu dipakai, misalnya dengan berbagai iming-iming hutang, supaya tetap terkooptasi pihak luar.

Purbayu Budi S (1985) dalam penyusunan skripsi meneliti bagaimana pengaruh budaya (*culture*) terhadap pembangunan, khususnya pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gotong royong terpengaruh oleh sistem religi yang dianut dalam masyarakat dan dalam hal ini dengan memakai kriterianya Clifford Geertz, yaitu abangan dan santri. Salah satu temuannya adalah bagi pedukuhan tipe abangan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bersifat tradisional, misalnya bersamaan cari batu dan bersama pula mengerjakan pembangunan jalan, tetapi bagi penduduk dengan tipe santri karena terpengaruh tradisi dagang Nabi lebih suka secara bersama menyumbangkan uang. Meskipun begitu, kegiatan gotong royong mencerminkan etos subsistensinya Scott (1981) di mana bagi golongan masyarakat dengan status sosial tinggi dapat meninggalkan kerja bakti dan tolong menolong, asal tahu diri. Karena konsep tahu diri berdasarkan kesadaran moral dapat mampat, akibatnya dapat munculnya kasus *white collar crime*.

Hasil studi Denys Lombard dari Perancis tentang aktivitas perdagangan dari orang-orang Asia di Samudera Hindia dan Laut Cina pada abad 13 sampai 19 di mana hasilnya bangsa Nusantara hanya mampu sebagai penguasa jalur-jalur ekonomi, akan tetapi bukan sebagai pelaku ekonomi. Artinya yang dilakukan oleh kebanyakan bangsa kita pada waktu itu adalah mengharapkan retribusi (upeti) dari para pengguna jasa pelayaran, bukan sebagai seorang wiraswasta. Studi Sutherland tentang elite politik di Jawa juga menunjukkan hasil yang serupa di mana dalam pergantian kekuasaan, hanya kulit luarnya

saja yang berubah, intinya tetap saja sama yaitu siapa yang berkuasa, siapa yang mendapatkan keuntungan.

Studi mengenai penguasaan lahan di Jawa pada abad XIX menunjukkan terjadinya eksploitasi terhadap petani kecil. Petani dalam sistem *apanage* ini memiliki hak mengerjakan (menggarap), dan bukan hak milik. Meskipun kebanyakan petani mempunyai status rendah, namun secara ekonomi kehidupan negara sangat tergantung di pundak petani. Sebagai daerah agraris, Kesunanan Surakarta dan juga Pura Mangkunegaran sangat tergantung pada keberhasilan eksploitasi petani ini. Demikian pula masyarakat pedesaan juga tidak ada pilihan lain kecuali tekun menggarap tanah yang mereka pinjam dari raja itu (Wasino, 2006).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Indonesia yang tidak dapat memanfaatkan kekayaan alamnya disebabkan karena terperangkap penjajahan di mana dulunya yang diperangkap pertaniannya dalam arti luas (termasuk perkebunan) dengan politik tanam paksa. Setelah kemerdekaan Indonesia tetap terperangkap sistem kapitalisme dunia di mana dengan iming-iming hutangnya, maka sumber daya alam dikuasai pihak lain.

Studi Lombart, Sutherland dan Purbayu Budi S menunjukkan bagaimana pengaruhnya faktor non ekonomi terhadap pembangunan ekonomi. Karena sifat masyarakat yang paternalistis, di mana bagi kalangan strata masyarakat bawah sangat sulit mengoreksi kesalahan atasan, maka moralitas kalangan strata masyarakat atas yang sebenarnya harus dijunjung tinggi sering diselewengkan. Dengan iming-iming upeti yang akan diterima, sering para elite berpikiran jangka pendek di mana yang penting dirinya dan kelompoknya diuntungkan, maka mengenai pihak lain terserah apa yang akan terjadi, termasuk terjadinya kemiskinan massa.

IV. KESIMPULAN

Permasalahan kemiskinan massa yang masih membelit kita semua secara teoritis hanya dapat dipecahkan apabila kita menggunakan tindakan dan berpikir yang luar biasa. Pemikiran yang luar biasa merupakan koreksi terhadap pikiran yang biasa. Dalam hal ini perlu ditinjau kembali pembahasan ilmu ekonomi yang berdasarkan kepada paradigma positivisme kuantitatif dengan mengajukan paradigma analisis secara holistik.

Kwik Kian Gie (2006) mengajukan perlunya pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme secara signifikan supaya berbagai persoalan bangsa Indonesia, termasuk kemiskinan, dapat dihilangkan atau dikurangi secara

optimal. Karena seringnya para petinggi kita kurang mempunyai moralitas yang baik, maka penegakan hukum yang keras harus dikedepankan. Konsep *carrot and stick* dapat diberlakukan di Indonesia, karena terbukti berhasil di berbagai negara seperti Singapura dan RRC.

Mengingat budaya kita masih kental dengan paternalisme, maka moralitas yang kurang baik yang ada para elite mudah menular kemana-mana. Seperti halnya dikemukakan oleh antropolog Achmad Fedyani Saifuddin yang baru dikukuhkan sebagai guru besar UI pada tanggal 24 Januari 2007. Moralitas yang kurang baik pada para petinggi menurun pada para bawahan berujud budaya menerabas, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa (*Kompas*, 25 Januari 2007).

Berbagai program pengentasan kemiskinan akan berhasil dengan baik apabila disertai dengan moralitas yang baik, yang dipunyai pihak-pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Ekonom terkenal John R. Commons (dalam Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2003) menekankan perlunya memperhatikan masalah etika dan hukum dalam membahas masalah ekonomi. Pemikiran Mubyarto tentang ekonomi Pancasila maupun berkembangnya ekonomi syariah seperti sekarang ini, merupakan pertimbangan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kita juga diingatkan oleh Prof.Dr. Chatamarrasyid Air, SH, MH ketika berbicara dalam seminar revisi UU 22/2004 di kampus UNS tentang perbuatan korupsi yang sangat merugikan bagi kita semua, termasuk membuat kemiskinan massa dan dapat membuat bubar negara Indonesia. Menurutnya, tanda-tanda berbagai daerah ingin pisah dengan Indonesia sudah muncul. Misalnya, di Bengkalis, muncul keinginan beberapa kelompok memisahkan diri dari Indonesia. Mereka ingin bergabung ke Malaysia, karena jengkel melihat pemerintah menangani kasus korupsi, akibat bobroknya pengadilan. Lebih lanjut menurutnya, jangan sampai anak cucu kita nanti hanya bisa mengetahui keberadaan negeri yang bernama Indonesia, yang sekarang hilang karena digerogoti para penjiat dan koruptor. Sama dengan Majapahit yang hancur ketika anak turun Brawijaya tidak kuasa menghadapi korupsi (*Suara Merdeka*, 29 Januari 2007).

Dengan demikian, pengentasan kemiskinan massa yang perlu dilakukan di Indonesia memerlukan perubahan paradigma. Bertindak dan berpikir yang luar biasa sangatlah diperlukan supaya salah satu penyakit yang kronis menimpa kebanyakan masyarakat Indonesia dapat diatasi dengan hasil yang bermakna. Masalahnya, adalah bagaimana jadinya apabila pemecahan masalah kemiskinan masih menggunakan pendekatan yang biasa, tanpa mempertimbangkan aspek kultur, hukum, maupun seperti dikemukakan oleh Gus Mus maupun Akhmad Tohari (*Wawasan*, 22 Desember 2006) perlu dilakukan

reformasi mental pada bangsa ini; maka bersiap-siaplah akan campur tangan Allah yang maha kuasa atas perbuatan kita yang sudah di luar kewajaran..

DAFTAR PUSTAKA

- Capra, Fritjof. 2000 *Titik Balik Peradaban Sains, masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Terjemahan M. Thoyibi. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- _____. 2001. *Tao of Physics. Menyingkap Paralisme Fisika Modern dan Mistisisme Timur*. Terjemahan Pipit Maizer. Yogyakarta: Jalasutra.
- Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Galbraith, John Kenneth. 1983. *Hakikat Kemiskinan Massa*. Terjemahan Tom Anwar. Jakarta: Sinar Harapan
- Horgan, John. 2005. *The End of Science Senjakala Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan Djejen Zainuddin. Jakarta: Teraju.
- Kompas*, "Terjadi Proses Perapuhan Sendi-sendi Berbangsa, Kemiskinan ikut Mendorong Munculnya Budaya Menerabas", 25 Januari 2007.
- Kwik Kian Gie. 2006. *Pikiran yang Terkorupsi*. Jakarta: Kompas
- Levitt, Steven D. & Stephen J. Dubner. 2006. *Freakonomics*. Terjemahan Akhmad Fauzi. Jakarta: Gramedia
- Mubyarto & Daniel W. Bromley. 2003. *A Development Alternative for Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Myrdal, Gunnar. 1972. *Asian Drama. An Inquiry in to the Poverty of Nations*. An Abridgment by Seth S. King. New York: Vintage Books
- _____. 1973. *Against the Stream Critical Essays on Economics*. London: Macmillan Press.
- Perkins, John. 2005. *Confessions of an Economic Hit Man*. Terjemahan Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani. Jakarta: Abdi Tandur

- Purbayu Budi Santosa. 1985. “Peranan Gotong Royong pada Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Karanganyar)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tidak Diterbitkan.
- Satjipto Rahardjo. 2007. “Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa” dalam *Uni Sosial Demokrat*. www.unisosdem.org/ekopol, 2 Januari 2007
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Seabrook, Jeremy. 2006. *Kemiskinan Global Kegagalan Model Ekonomi Neo Liberalisme*. Terjemahan Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.
- Suara Merdeka*, “Kembalikan Fungsi Komisi Yudisial seperti Dulu”, 29 Januari 2007.
- Ul Haq, Mahbub. 1983. *Tirai Kemiskinan Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor.
- Wahyu Susilo. 2007. “Kemiskinan di Indonesia” dalam *Uni Sosial Demokrat*. www.unisosdem.org/ekopol, 2 Januari 2007
- Wasino, 2006. *Tanah, Desa, dan Penguasa. Sejarah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa*. Semarang: Unnes Press.
- Wawasan*, “Bangsa ini Memerlukan Revolusi Mental”, 22 Desember 2006.